KLIPPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 15 Agustus 2018

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Investor Daily (Halaman, 1)	Rabu, 15 Agustus 2018	Jepang Beri Utang Rp 1,2 T untuk Jalan Akses Patimban	Dalam rangka mempercepat optimalisasi Pelabuan Patimban
2	Investor Daily (Halaman, 4)	Rabu, 15 Agustus 2018	Opini	Perkotaan dan Ketimpangan
3	Investor Daily (Halaman, 12)	Rabu, 15 Agustus 2018	Presiden: Sekolah Roboh di Lombok Segera Dibangun	Setelah bencana gempa menerjang Lombok
4	Investor Daily (Halaman, 15)	Rabu, 15 Agustus 2018	PUPR Minta Bank Ikut Pantau Kualitas Rumah	Untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5	Koran Tempo, (Halaman, 6)	Rabu, 15 Agustus 2018	Gerbang Tol Rute Atlet Asian Games Batal Ditutup Permanen	Aturan ganjil-genap jadi andalan pengaturan lalu lintas
6	Koran Tempo, (Halaman, 21)	Rabu, 15 Agustus 2018	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Dimulai	Pemerintah menggarap jalan dari Pamanukan hingga Patimban
7	Koran Tempo, (Halaman, 31)	Rabu, 15 Agustus 2018	Jalan Margonda Depok Dinilai Kekurangan Jembatan Penyebrangan	Depok dinilai tak ramah terhadap pejalan kaki
8	Kompas (Halaman, 17)	Rabu, 15 Agustus 2018	Kota Bandara Kertajati Segera Dibangun	Saat ini tengah disiapkan pembangunan apartemen dan hotel
9	Kompas (Halaman, 18)	Rabu, 15 Agustus 2018	Citarum Masih Tercemar Sampah dan Limbah	Rata-rata volume sampah mencapai 500.000 meter kubik pertahun
10	Kompas (Halaman, 18)	Rabu, 15 Agustus 2018	Kamboja Belajar dari Surabaya	Untuk bidang pengelolaan kota
11	Media Indonesia (Halaman, 13)	Rabu, 15 Agustus 2018	Infrastruktur Kunci Pacu Pertumbuhan	Jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan, waduk, sarana irigasi ialah urat nadi perekonomian
12	Media Indonesia (Halaman, 20)	Rabu, 15 Agustus 2018	Jokowi akan Bangun Risha di Lombok	Rumah korban gempa Lombok akan dibangun kembali dengan system rumah instan sederhana (Risha) tahan gempa
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 15 Agustus 2018	Jabar Pacu Akses Penghubung Patimban	Pemerintah menggarap jalan dari Pamanukan hingga Patimban
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Rabu, 15 Agustus 2018	Tak Capai 50% Target, Kuota Dialihkan	Pemerintah akan mengevaluasi kinerja perumahan
15	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)	Rabu, 15 Agustus 2018	60% Paket Kontraktual Diprioritaskan	Untuk lelang dini di Kementerian PUPR

Judul	**Jepang Beri Utang Rp 1,2 T untuk Jalan Akses Patimban**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 1)		
Resume	Dalam rangka mempercepat optimalisasi Pelabuan Patimban		

Jepang Beri Utang Rp 1,2 T untuk Jalan Akses Patimban

Oleh **Eko Adityo Nugroho**

JAKARTA – Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan pinjaman senilai total Rp 1,2 triliun untuk pembangunan jalan akses sepanjang 8,2 kilometer menuju Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Jalan akses yang segera dibangun itu mayoritas konstruksinya secara layang (*elevated*) dan ditargetkan rampung pada akhir 2019.

"Pemilihan model *elevated*, karena jalan akses dibangun pada tanah lunak. Jalan ini nantinya akan tersambung dengan jalan Pantura," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sugiyartanto seusai menyaksikan penandatanganan paket kontrak pekerjaan proyek itu, di Jakarta, Selasa (14/8).

Paket pekerjaan jalan akses sepanjang 8,2 kilometer tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Jabar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga dengan kontraktor Shimizu Corporation bersama PT Bangun Cipta Kontraktor. Paket pekerjaan ini bernilai Rp 1,127 triliun.

Pada kesempatan yang sama juga ditandatangani paket pengawasan supervisi pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban senilai Rp 63,51 miliar dengan konsultan Katahira & Engineer International bekerja sama dengan Nippon Engineering Consultant yang berasosiasi dengan PT Perentjana Djaja, PT Sarana Multi Daya, PT Parama Karya Mandiri, PT Mekaro Daya Mandiri, dan PT Maratama Cipta Mandiri.

Profil Pelabuhan Patimban

Tahap pembangunan	Tiga tahap
Nilai total proyek	Rp 43,22 triliun
Tanggal mulai operasional tahap I	Maret 2019
Kapasitas kontainer	Tahap I : 3,5 juta *twenty foot equivalent units* (TEUs)
	Tahap II : 5,5 juta *twenty foot equivalent units* (TEUs)
	Tahap III : 7,5 juta *twenty foot equivalent units* (TEUs)
Kapasitas kendaraan	600.000 CBU
Pembiayaan	Pinjaman total dari Jepang sebesar Rp 14,17 triliun.
	Jepang mematok bunga pinjaman 0,1 persen dan jasa
	konsultasi 0,01 persen dengan durasi pinjaman 40 tahun.

Sumber: berbagai sumber, diolahInvestor Daily

▶ Bersambung ke hal 11

BERITASATU.COM

Jepang Beri Utang Rp 1,2 T untuk Jalan Akses Patimban

▶Sambungan dari hal 1

Turut hadir dalam acara tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa dan perwakilan Duta Besar Jepang bidang Ekonomi Takada Mari. Sedangkan pimpinan Ditjen Bina Marga yang hadir adalah Sekretaris Ditjen Bina Marga Soebagiono, Direktur Pembangunan Jalan Herry Marzuki, Direktur Preservasi Jalan Atyanto Busono, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VI Hari Suko.

Proyek jalan penghubung sepanjang 8,2 kilometer ini terdiri atas jalan biasa sepanjang 5,9 kilometer, jalan layang 1,6 kilometer, dan timbunan 0,96 kilometer. Jalan tersebut akan dibangun dua arah dengan kapasitas empat lajur dan akan tersambung dengan ruas nasional Pantai Utara Jawa.

Sugiyartanto optimistis konstruksi jalan akses ini dapat selesai tepat waktu. Hal itu lantaran hingga saat ini proses pembebasan lahan telah mencapai lebih dari 98%. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga hingga saat ini tinggal tersisa 144 bidang tanah yang sedang diproses pembebasan lahannya oleh Ditjen Perhubungan Laut. Dirjen Bina Marga juga meminta kepada PPK dan kontraktor untuk dapat memanfaatkan material, komponen dan SDM dalam negeri untuk pengerjaan jalan akses Patimban.

"Tolong perhatikan juga risiko kecelakaan kerja, ini pekerjaan besar. Kepada seluruh unit kerja dan konsultan pengawas tolong memerhatikan SOP (standar operasional prosedur), sistem kesehatan dan keselamatan, peninjauan kembali jadwal kerja, jumlah jam kerja dan istirahatnya," lanjut Sugiyartanto.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menambahkan, pihaknya akan berperan maksimal guna memuluskan pembangunan fasilitas pendukung tersebut seperti urusan penetapan lokasi dan penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan. "Mengenai koordinasi, agar Patimban bisa lebih cepat selesai dari target," ujarnya.

Terkait pembebasan lahan di areal pelabuhan, Iwa mengatakan, dari keseluruhan bidang tanah, sebagian besar memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen yang menjelaskan penguasaan yang sah, seperti sertifikat, girik, dan akte jual beli tanah.

Dia menambahkan dalam proses ganti rugi atau kompensasi, pada kondisi lahan yang relatif sama, bukti kepemilikan selayaknya turut menentukan besaran kompensasi atau ganti rugi. Apalagi hal ini karena bukti kepemilikan merupakan bukti resmi hak atas tanah.

Sementara itu, Perwakilan Duta Besar Jepang bidang Ekonomi Takada Mari mengatakan, pinjaman pemerintah Jepang ini merupakan simbolis hubungan bilateral kedua negara. "Kebetulan pada tahun ini juga merupakan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Kami berbahagia proyek ini merupakan proyek simbolis yang telah disepakati oleh pimpinan kedua belah negara," ucap Takada.

Menurut dia, banyak produsen barang dan elektronik Jepang yang berlokasi di timur Jakarta mengeluhkan padatnya jalur logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya Patimban, maka diharapkan arus distribusi barang produksi menjadi lebih lancar sehingga dapat menekan biaya transportasi.

Jalan Tol

Sugiyartanto melanjutkan, jalan akses Patimban itu merupakan tahap satu yang akan dibangun. Adapun tahap dua akan dibangun jalan tol yang mengarah ke jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Rencana tersebut sudah masuk ke sistem jaringan jalan yang ada di Ditjen Bina Marga. Dengan panjang 30-40 Km, konstruksi jalan tol diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun.

"Pembangunannya akan melihat kebutuhan di lapangan nantinya, mungkin akan dibangun dalam dua tahun ke depan," ujarnya.

Iwa menambahkan, pembangunan akses tol Cipali juga perlu didorong bersamaan, karena berdasarkan target Pelabuhan Patimban sudah bisa beroperasi pada Februari 2020. Pemprov Jawa Barat menilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang menginisiasi untuk membangun tol tersebut bisa mengerjakan ini secara paralel. "Jadi supaya seiring dengan penyelesaian Patimban, jalan akses untuk tolnya juga sudah harus siap," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengemukakan, sebagai salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam tiga fase. Tahapan konstruksi akan dimulai pada Agustus 2018, *soft opening* pada awal 2019, dan ketiga fase secara keseluruhan ditargetkan rampung pada 2027.

Pembangunan Pelabuhan Patimban, kata Agus, dilaksanakan melalui pendanaan dari *official development assistance* (*ODA loan*) Pemerintah Jepang. Terdapat 10 paket pekerjaan yang terbagi menjadi dua fase. Perjanjian pinjaman yang dilaksanakan tahun lalu itu baru mencakup dua fase.

Dia menerangkan, pada pekerjaan fase 1, Kemenhub mendapat tugas mengerjakan tiga paket konstruksi, satu paket konsultan supervisi, dan satu paket konsultan pemilihan operator. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) mendapatkan tugas mengerjakan satu paket konstruksi dan 1 paket supervisi.

Menurut Agus Purnomo, saat beroperasi pada 2019, Pelabuhan Patimban disiapkan dengan kapasitas 3,5 juta *twenty foot equivalent units* (TEUs) dan 382 ribu unit kendaraan bermotor utuh tak terurai (completely built up/CBU). Selanjutnya, pada tahap kedua, kapasitas pelayanan akan ditingkatkan menjadi 5,5 juta TEUs dan pada tahap ketiga meningkat hingga 7,5 juta TEUs.

Untuk itu, Agus mengharapkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat sekitar agar proyek nasional ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai target.

"Kami berharap beroperasinya Pelabuhan Patimban yang akan difokuskan untuk ekspor produk otomotif nasional mampu mengefisienkan biaya ekspor produk otomotif, menurunkan biaya logistik, serta mendukung kelancaran arus barang," tegas dia.**(esa/ant)**

Judul	**Opini**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 4)		
Resume	Perkotaan dan Ketimpangan		

Perkotaan dan Ketimpangan

Oleh **Edy Purwo Saputro**

Para pemenang pilkada serentak semestinya jangan lantas terlena tapi harus langsung kerja keras membangun daerahnya. Muara harapan adalah mampu mereduksi kemiskinan dan ketimpangan.

Kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur sejatinya untuk mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Oleh karena itu, seyogianya kebijakan ini didukung kepala daerah pemenang pilkada.

Persoalan ketimpangan tidak hanya terkait dengan besaran nominal dan sebaran yang terjadi, tetapi juga semakin maraknya orang asing mencari 'periuk nasi' di perkotaan. Indikator ketimpangan mengacu Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu jika angka lebih dari 0,5 maka terjadi ketimpangan tinggi, sedangkan jika berkisar 0,4–0,5 terjadi ketimpangan sedang, dan jika kurang dari 0,4 berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Dari data BPS, ketimpangan di Indonesia cenderung turun yaitu rasio Gini pada September 2015 sebesar 0,402 menjadi 0,397 (Maret 2016) dan 0,394 (September 2016). Sedangkan rasio Gini di Jakarta dari 0,421 (September 2015) menjadi 0,411 (Maret 2016), dan 0,397 pada September 2016. Bahkan mengacu World Happiness Report 2018, Indonesia ada di urutan 62 dengan indek Gini 0,395 dan versi BPS per September 2017 indeks Gini Indonesia mencapai 0,391.

Berlanjut

Problem ketimpangan tidak terlepas dari kemiskinan, sementara kemiskinan juga terkait dengan ancaman sosial, termasuk fakta pengangguran. Fakta ini menegaskan besarnya tantangan bagi pemenang pilkada serentak dan pilpres 2019.

Persoalan ketimpangan ternyata masih parah, meski sudah ada progres penurunan. Di satu sisi, ini memicu heterogenitas yang rentan terhadap riak konflik, termasuk ancaman SARA, meski di sisi lain ketimpangan memicu migrasi yang menjadikan perkotaan dan daerah penyangganya sebagai tujuan. Dampak dari situasi ini yaitu kemiskinan.

■ Edy Purwo Saputro

Terkait ini jumlah penduduk miskin, di Jakarta per Maret 2017 ada penduduk miskin sebanyak 389,69 ribu orang (3,77%) dibanding per September 2016 yaitu 385,84 ribu orang atau 3,75% atau meningkat 3,85 ribu orang. Problem sosial ini jelas menjadi "PR" yang tidak mudah bagi pemerintah untuk penataan ke depan.

Problem kompleks pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga direduksi dengan otonomi daerah (otda), meski 16 tahun otda ternyata justru kian banyak pemekaran daerah yang kemudian memicu berbagai problem baru, termasuk tingginya migrasi dan korupsi. Persoalan utama migrasi yaitu mencari kehidupan yang lebih baik, dan perkotaan masih diyakini memberikan perbaikan kehidupan. Asumsi ini mengebiri semangat otda yang sebenarnya diharapkan memacu ekonomi daerah. Namun, otda ternyata tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari banyaknya daerah tertinggal, kemiskinan dan ketimpangan.

Ironisnya di wilayah Indonesia Timur masih ada 105 kabupaten termasuk daerah tertinggal. Jadi, fakta ketimpangan di Jakarta bukanlah persoalan baru, meski tantangan dan juga faktor pemicunya cenderung kompleks. Sehingga identifikasi dan pemetaan dari kasus ini menjadi relevan untuk dilakukan, setidaknya bisa untuk mereduksi dampak negatif dari ketimpangan, termasuk misalnya ancaman sosial dan kriminal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan.

Fakta sebaran daerah tertinggal menjadi ancaman serius terhadap ketimpangan dan migrasi. Oleh karena itu, ego pemekaran daerah sudah selayaknya dihentikan dan juga perlu ada kaji ulang terhadap otda itu sendiri, termasuk juga kaji ulang terhadap daerah pemekaran yang sudah ada, terutama untuk mereduksi kemiskinan di daerah pemekaran.

Tingkat kemiskinan dan juga perubahannya bervariasi menurut provinsi. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan. Yakni seperti pertumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat karya atau padat modal), infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, implementasi program-program antikemiskinan dari pemerintah.

Sebaran investasi ternyata juga belum mampu mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Ironisnya, di era otda justru banyak kasus OTT melibatkan kepala daerah, baik suap atau korupsi.

Kawasan Kumuh

Fakta ketimpangan antarwilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana-prasarana ekonomi–sosial, terutama di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan, serta daerah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan-perdesaan (misalnya area Jabodetabek dan daerah penyangga) juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dari perkotaan dan tingginya ketergantungan perdesaan terhadap perkotaan.

Hal itu disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi di perdesaan. Fakta ketimpangan ini memicu migrasi. Di sisi lain, ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi, juga memicu ancaman kerawanan sosial di daerah perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.

Jadi, wajar jika di Jakarta masih banyak kawasan kumuh dan karenanya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bertekad menjadikan Jakarta bebas kawasan kumuh pada 2019. Ironisnya pendatang melalui arus balik pada Lebaran diprediksi akan meningkat. Jika ini bisa diantisipasi oleh para pemenang pilkada melalui pembangunan di daerah, maka Jakarta akan bisa terbebas dari beban migrasi tahunan.

Sinergi program tersebut dilakukan dengan model 100-10-100 yang dicanangkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan program pengembang permukiman secara berkelanjutan yaitu melalui komitmen pencapaian 100% akses air minum, mereduksi kawasan kumuh 0%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat.

Data Kempupera, di Indonesia ada 37.407 hektare kawasan kumuh dan tersebar di mayoritas perkotaan, akses pelayanan air minum baru 67,7%, dan akses pelayanan sanitasi baru 59,7%. Pencapaian program itu pada dasarnya adalah sasaran dari Millenium Development Goals (MDGs) sampai tahun 2020. Pencapaian ini tentu sangat berat. Sebagai misal, menurut data BPS, jumlah kawasan kumuh di DKI Jakarta mencapai 309 RW kumuh, dengan daerah Jakarta Utara menjadi kawasan terkumuh.

Edy Purwo Saputro
Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Judul	**Presiden: Sekolah Roboh di Lombok Segera Dibangun**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 12)		
Resume	Setelah bencana gempa menerjang Lombok		

Presiden: Sekolah Roboh di Lombok Segera Dibangun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, selain membangun kembali rumah warga, pemerintah juga segera membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh akibat gempa di Lombok.

"Nanti sekolahnya akan segera dibangun oleh Pak Menteri PU, tapi memang butuh waktu karena sekolahnya roboh. Kita berdoa bersama kepada Allah agar cobaan ini segera bisa kita selesaikan," ujar Presiden Jokowi seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (14/8).

Sejumlah lokasi pengungsian bagi korban terdampak gempa di Lombok Utara dihampiri oleh Presiden Jokowi pada Selasa pagi.

Usai meninjau bangunan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung yang mengalami kerusakan, Presiden dan rombongan menyambangi posko pengungsian di halaman Polsek Pemenang, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Di lokasi tersebut, menurut data yang didapat, sebanyak 3.662 pengungsi mendapatkan bantuan sementara menunggu perbaikan tempat tinggal yang akan dibantu pemerintah pusat.

Sejumlah pengungsi sempat menyampaikan keluhannya langsung kepada Presiden mengenai aktivitas belajar mengajar anak-anak mereka yang terhenti akibat bencana gempa ini.

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mulai membangun kembali sekolah-sekolah yang roboh usai gempa melanda. "Nanti sekolahnya akan segera dibangun oleh Pak Menteri PU," ujar Presiden.

Selain itu, pemerintah mulai pekan depan juga akan membangun kembali pasar-pasar yang turut roboh setelah gempa. Pembangunan pasar tersebut diharapkan dapat menggerakkan kembali perekonomian warga setempat.

Sementara terkait tempat tinggal warga Lombok Utara yang mengalami kerusakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bantuan sebesar Rp50 juta bagi tempat tinggal warga yang mengalami kerusakan berat. Adapun terhadap kerusakan sedang, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp25 juta.

"Nanti dikerjakan bersama-sama, diawasi dari provinsi oleh Pak Gubernur. Nanti juga akan dibimbing oleh Pak Menteri PU supaya yang dibangun nanti rumah yang tahan gempa. Diajari bagaimana membangunnya," tuturnya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi. **(ant)**

Judul	**PUPR Minta Bank Ikut Pantau Kualitas Rumah**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Investor Daily (Halaman, 15)		
Resume	Untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)		

RUMAH SUBSIDI

PUPR Minta Bank Ikut Pantau Kualitas Rumah

Oleh **Imam Mudzakir**

JAKARTA – Bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) diminta memantau langsung pengembang yang membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, pemerintah menambah jumlah bank penyalur FLPP menjadi 43 dari semula 40 bank.

"Kami harapkan perbankan ikut memantau kualitas rumah yang dibangun (pengembang penerima dana subsidi), karena ada dana pemerintah dan juga menjaga konsumen memiliki rumah sesuai yang diharapkan," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lana Winayanti, usai penandatanganan perjanjian kerja sama operasi (PKO) antara pemerintah dengan perbankan, di Jakarta, Selasa (14/8).

Dia menambahkan, pemantauan langsung terhadap pengembang yang membangun rumah subsidi diperlukan karena banyak ditemukan rumah subsidi bermasalah kualitasnya.

Sementara itu, untuk tahun 2018, Kementerian PUPR menunjuk 43 bank untuk penyaluran subsidi KPR FLPP. Sebanyak 40 di antaranya telah menandatangani Perjanjian kerja sama operasi (PKO) pada akhir 2017, namun pada Selasa (14/8) hanya 39 bank menandatangani penambahan klausula atau pasal *(addendum)* PKO dan empat bank menandatangani PKO baru. Addendum dilakukan karena ada perubahan porsi pemerintah dari 90% menjadi 75%. Ke-43 bank itu mendapat tugas menyalurkan dana Rp 6,5 triliun dengan target rumah yang dibangun sekitar 70 ribu unit.

Menurut Lana, kesepakatan kerja sama ini merupakan upaya Kementerian PUPR mempercepat penyediaan rumah bersubsidi melalui pembiayaan perbankan. Ke-43 bank yang ikut penyaluran KPR FLPP tersebut terdiri atas 11 bank umum nasional dan 32 bank pembangunan daerah. Mereka akan mendapat bantuan dana jangka menengah panjang sebesar 2% dari pemerintah melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan memperoleh *cost of fund* yang murah dari pemerintah.

Lana menegaskan, sejumlah fasilitas ini yang yang diberikan kepada perbankan ini harus diikuti kesertusan perbankan menyalurkan kredit perumahan untuk MBR.

"Mereka harus menyalurkan kredit sebesar 50% dari kesepakatan di masing-masing perjanjian kerja sama," kata dia.

Proporsi pendanaan antara pemerintah dan perbankan semula adalah 90 : 10, kini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 461 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera disebutkan bahwa proporsinya diubah menjadi 75 : 25. Proporsi baru itu berlaku mulai 20 Agustus 2018.

BTN 9.500 Rumah

Sementara itu, Lana menjelaskan, nilai KPR maupun segmentasi penerima kredit yang akan digelontorkan oleh masing-masing bank berbeda satu sama lain. BRI Agroniaga misalnya, fokus pada pembiayaan perumahan pekerja di perkebunan. "Jadi masing-masing penyalur punya sasaran masing-masing," ujarnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang merupakan salah satu dari empat bank baru penandatangan PKO pada tahap awal diberi alokasi penyaluran KPR Sejahtera (FLPP) untuk 9.500 rumah. Dari jumlah tersebut 464 unit di antaranya akan dilaksanakan BTN Syariah lewat akad murabahah (jual beli).

Terkait hal itu BTN menandatangani Perjanjian Kerjasama Tripartit dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP PUPR) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tentang penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera (KPR Sejahtera) FLPPatau biasa disebut KPR Subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen bersama, antara Bank BTN, SMF dan PPDPP untuk membantu pemerintah dalam membiayai KPR Sejahtera untuk mempercepat pencapaian program sejuta rumah.

"PKS ini sangat strategis bagi kami, karena dapat bersinergi dalam pembiayaan bersama KPR Sejahtera dalam rangka penyediaan dana jangka panjang," ungkap Direktur Bank BTN, Iman Nugroho Soeko, saat menandatangi PKS Tripartit di kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (14/8).

Menurut Direktur utama PPDPP Budi Hartono, akan mengevaluasi PKO penyaluran FLPP pada akhir triwulan III-2018 atau sekitar awal Oktober. Bank yang tidak mencapai target 50% dari perjanjian akan dicoret oleh Kementerian PUPR. "Kami akan evaluasi dan penyesuaian atas target jika bank pelaksana tidak mencapai komitmen 50% maaf kami tidak bisa lanjutkan, akan dialihkan ke bank lain yang siap," kata Budi.

Iman menegaskan, pihaknya juga siap menerima limpahan dari bank pelaksana lain yang belum optimal menyalurkan FLPP untuk membantu PPDPP mencapai target yang dicanangkan.

BTN optimistis mampu mengoptimalkan FLPP dan berperan aktif mendukung sektor perumahan dalam menyalurkan pembiayaan sektor perumahan. Hal ini sejalan dengan target Bank BTN untuk mengejar angka penyaluran pembiayaan perumahan subsidi yang dipatok sekitar 600.000 unit.

"Kami melihat peluangnya masih besar karena permintaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap tumbuh dan terdorong oleh kebijakan Bank Indonesia yang telah resmi memberlakukan relaksasi rasio kredit terhadap nilai agunan atau *Loan To Value* properti per 1 Agustus lalu," kata Iman.

Bagi Sekjen DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Danil Djumali, langkah pemerintah memberikan mempercayakan kembali kepada BTN sebagai penyalur KPR FLPP merupakan langkah positif. "Pengembang juga optimis kalau BTN salurkan FLPP akan lebih cepat lagi progres penyerapan perumahan subsidi ini dana bisa lebih cepat KPR rumah subsidi," kata dia.

Judul	**Gerbang Tol Rute Atlet Asian Games Batal Ditutup Permanen**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Koran Tempo, (Halaman, 6)		
Resume	Aturan ganjil-genap jadi andalan pengaturan lalu lintas		

Gerbang Tol Rute Atlet Asian Games Batal Ditutup Permanen

Rombongan bus atlet Asian Games 2018 melintasi tol dalam kota saat simulasi penutupan pintu tol di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Aturan ganjil-genap nomor kendaraan lebih diandalkan.

Inge Klara Safitri
inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah membatalkan rencana penutupan secara permanen tujuh gerbang tol selama perhelatan Asian Games 2018. Keputusan itu diambil setelah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya mengevaluasi hasil uji coba penutupan ketujuh gerbang tersebut. "Akan ada penutupan yang sifatnya situasional," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar M. Yusuf, kemarin.

Yusuf menerangkan, berdasarkan hasil uji coba buka-tutup gerbang tol, tak ada perbedaan waktu tempuh yang signifikan dari wisma atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, ke sejumlah arena olahraga Asian Games.

Dia mencontohkan, pada waktu simulasi, perjalanan dari wisma atlet ke Taman Mini Indonesia Indah—juga arah sebaliknya—memakan waktu sekitar 27 menit. Waktu tempuh itu hampir sama baik ketika sistem buka-tutup gerbang tol diberlakukan maupun tidak. Untuk memperlancar perjalanan rombongan atlet, pemerintah selanjutnya akan mengandalkan aturan ganjil-genap pelat nomor kendaraan.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, pada Juli lalu menjelaskan bahwa penutupan 19 pintu tol ditujukan untuk memastikan kelancaran perjalanan rombongan atlet yang dimulai pukul 05.00.

Semula, BPTJ mengusulkan agar puluhan gerbang tol ditutup permanen dan situasional. Rencana itu berubah menjadi penutupan 19 gerbang tol yang dibagi dalam dua waktu, pukul 06.00-17.00 WIB untuk 10 pintu tol dan pukul 12.00-21.00 WIB untuk 9 pintu tol lainnya.

Setelah sehari diuji coba, gerbang tol yang diusulkan ditutup permanen berkurang menjadi tujuh unit. Empat gerbang tol (Angke 2, Tanjung Duren, Slipi 2, TMII 1) semula akan ditutup pada pukul 06.00-17.00 WIB. Tiga gerbang tol lainnya (Angke 1, Slipi 1 dan TMII 2) diusulkan ditutup pada pukul 12.00-21.00 WIB.

Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Yusuf menjelaskan, ketujuh gerbang tol itu hanya akan ditutup ketika rombongan atlet dan ofisial Asian Games melintas. Setelah rombongan berlalu, gerbang tol akan dibuka kembali. "Kalau yang lewat beruntun, misalnya 10 menit, ya kami tutup 10 menit," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan, penutupan permanen tujuh gerbang tol dibatalkan demi mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan arteri. Sebab, selama uji coba, kemacetan merata terjadi di jalur arteri di sisi tol dalam kota. Perjalanan dari Jalan Jembatan Tiga, Jakarta Utara, menuju Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, misalnya, memerlukan waktu 1,5 jam sewaktu pelaksanaan uji coba buka-tutup gerbang tol pada 1 Agustus lalu. ●

IKLAN

Judul	**Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Dimulai**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Koran Tempo, (Halaman, 21)		
Resume	Pemerintah menggarap jalan dari Pamanukan hingga Patimban		

Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Dimulai

ISTIMEWA

Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, pada 2016.

Pemerintah menggarap jalan dari Pamanukan hingga ke Patimban.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

BANDUNG — Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pemerintah sudah meneken kontrak pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. "Jalan akses yang akan dibangun sepanjang 8,2 kilometer, dari Pamanukan ke Pelabuhan Patimban," ujar Iwa di kantornya, kemarin.

Iwa menyebutkan ada dua jenis jalan akses menuju Pelabuhan Patimban dengan total panjang 45,2 kilometer. Akses dari Patimban menuju jalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 37 kilometer dibangun oleh PT Jasa Marga (Persero). Sisanya dibangun pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pinjaman dari lembaga pembiayaan Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA).

Pembangunan jalan oleh pemerintah, menurut Iwa, memakan waktu 18 bulan dan ditargetkan selesai pada Desember 2019. "Proyek ini sejalan dengan penyelesaian tahap I pembangunan Pelabuhan Patimban," tuturnya. Jalan akses tersebut memiliki lebar 20 meter untuk menampung empat lajur kendaraan. Biaya konstruksi proyek ini mencapai Rp 1,121 triliun. "Ditambah kontrak untuk pelaksanaan supervisi Rp 63,5 miliar," kata Iwa.

Proyek ini digarap perusahaan asal Jepang, Shimizu Corporation, bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Iwa mengatakan jalan akses ini tersambung dengan jaringan jalan nasional di Pantai Utara Jawa serta jalan tol yang akan dibangun Jasa Marga. Dengan demikian, ujar Iwa, semua jalan akses menuju Pelabuhan Patimban bisa selesai bersamaan dengan pembangunan pelabuhan tahap I. "Pengerjaannya paralel."

Adapun pengerjaan konstruksi Pelabuhan Patimban akan dimulai bulan ini. Iwa mengatakan proyek ini siap memasuki fase *groundbreaking*. "Tapi persiapan untuk pelaksanaan konstruksi sedang dilaksanakan sejak penandatanganan kontrak pekerjaan Pelabuhan Patimban," ujarnya. Pelabuhan Patimban akan difungsikan untuk menampung lalu lintas kapal peti kemas terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, akhir pekan lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan akan meninjau kembali proyek Pelabuhan Patimban dan kereta cepat Jakarta-Surabaya, dalam hal penggunaan komponen impor. "Dua proyek itu spesifikasinya akan ditinjau lagi agar bisa ditekan penggunaan komponen impornya," tuturnya.

Menurut Djoko, lembaganya bersama pihak terkait sedang menggodok ketersediaan komponen dan nilai minimal kandungan lokal dalam dua proyek tersebut. Dia menjamin evaluasi ini tidak akan mengganggu waktu pembangunan proyek, khususnya Pelabuhan Patimban, yang baru selesai ditenderkan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bakal ikut menyisir kebutuhan komponen dalam negeri di proyek infrastruktur konektivitas. Selain untuk menekan defisit transaksi berjalan, menurut dia, penggunaan komponen dalam negeri membuat biaya proyek makin murah. Luhut juga mengatakan pembatasan penggunaan komponen impor dalam industri dan proyek infrastruktur bakal diatur melalui peraturan pemerintah.

● ANDI IBNU | AHMAD FIKRI (BANDUNG)

MEMO BISNIS

Lazada

Bersama JNE Hadirkan Fasilitas Cashless untuk Penjual

jual dalam mengirimkan barang kepada konsumen secara lebih cepat dan efisien sehingga mereka dapat mengelola *cash flow* usahanya dengan lebih baik.

Chief Executive Officer Lazada Indonesia Alessandro Piscini mengatakan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi para mitra, terutama para penjual UMKM,

Judul	**Jalan Margonda Depok Dinilai Kekurangan Jembatan Penyebrangan**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Koran Tempo, (Halaman, 31)		
Resume	Depok dinilai tak ramah terhadap pejalan kaki		

Jalan Margonda Depok Dinilai Kekurangan Jembatan Penyeberangan

DEPOK — Jalur utama Kota Depok, Jawa Barat, yakni Jalan Margonda Raya, dinilai tak ramah terhadap pejalan kaki karena trotoar kurang layak dan jembatan penyeberangan orang (JPO) kurang banyak.

Djamaluddin, warga Depok, mengeluhkan minimnya fasilitas trotoar dan JPO. Menurut dia, trotoar kebanyakan dipakai untuk tempat parkir kendaraan dan lapak pedagang kaki lima. Sedangkan jumlah jembatan penyeberangan kurang sehingga masyarakat memilih menggunakan jalur penyeberangan, seperti *pedestrian light control* atau *pelican crossing* (lampu penyeberangan). "Jadi warga yang mau menyeberang lebih aman karena kendaraan berhenti."

Adapun Pemerintah Kota Depok belum memberikan penjelasan tentang kelangkaan jembatan penyeberangan di Margonda. Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana belum memberikan jawaban pada saat diminta konfirmasi oleh *Tempo*, kemarin.

jang 4,8 kilometer Jalan Margonda Raya, hanya ada lima jembatan penyeberangan yang kurang nyaman, padahal kawasan itu pusat belanja dan kuliner.

"Akhirnya rawan kecelakaan karena pejalan kaki menggunakan bahu jalan," kata Djamaluddin kepada *Tempo* kemarin.

Berdasarkan pantauan *Tempo*, terdapat tiga jembatan penyeberangan pada jalur Jalan Margonda Raya sesi Lingkar Universitas Indonesia hingga perempatan Jalan Juanda, yakni di Margonda Residence, lantai jembatan penyeberangan Margo City bergoyang jika dilalui.

Menurut warga Depok lainnya, Muhammad Ardiansyah, minimnya jumlah jembatan penyeberangan di Margonda menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di antara pertigaan Jalan Arif Rahman Hakim dan perempatan Jalan Juanda. "Arus lalu lintas di situ padat karena Mal Depok," ucapnya.

Ardiansyah mengusulkan kepada pemerintah kota agar memperbanyak

Jembatan penyeberang di Apartemen Margonda Residence.

darma, dan Mal Margo City. Sedangkan dua lainnya terdapat di depan Kantor Wali Kota Depok dan Terminal Jembatan penyeberangan di Margo City dan Terminal Depok juga menjadi lokasi berjualan peda-

Judul	**Kota Bandara Kertajati Segera Dibangun**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 17)		
Resume	Saat ini tengah disiapkan pembangunan apartemen dan hotel		

Kota Bandara Kertajati Segera Dibangun

Kawasan Bandara Kertajati terus dikembangkan. Kini tengah disiapkan pembangunan apartemen dan hotel.

CIREBON, KOMPAS — Kota bandara (*aerocity*) di sekitar Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka segera dibangun. Selain jadi pusat logistik, kota seluas 3.480 hektar ini juga mencakup kawasan bisnis, energi, hingga kedirgantaraan.

"Pembebasan lahan sedang dilakukan. Dari kebutuhan sekitar 300 hektar, 160 hektar di antaranya sudah dibebaskan. Pembangunan apartemen, hotel, dan rumah sakit oleh PT PP Properti mulai disiapkan. Konstruksinya mulai November tahun ini," ujar Direktur Utama PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra di Kota Cirebon, Selasa (14/8/2018).

Menurut Virda, *aerocity* merupakan konsep kawasan industri yang terintegrasi dengan bandara, yaitu kluster bisnis, logistik, tempat tinggal eksklusif, energi untuk mendukung industri, pusat industri teknologi, dan kedirgantaraan. "Pembangunan ini dilakukan bertahap hingga 30 tahun," ucapnya.

Menurut Virda, *aerocity* ideal diterapkan di BIJB Kertajati. Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang yang menjadi gerbang keluar masuk komoditas ekspor, misalnya, akan terintegrasi dengan bandara yang jaraknya hanya 40 kilometer.

Kawasan industri di Karawang dan Bekasi juga telah terhubung dengan bandara melalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan meskipun harus melintasi jalan non-tol. Jalur kereta api akan terhubung dengan BIJB Kertajati. Bahkan, sejumlah pabrik dari Jabodetabek mulai berpindah ke kawasan Majalengka dan Cirebon.

Vice President Realty PT PP Properti Tjakra D Puteh menambahkan, kehadiran *aerocity* akan diawali dengan pembangunan apartemen pertama di Majalengka. Apartemen 15 lantai dengan tiga menara itu akan berisi 1.600 unit. Apartemen akan dilengkapi dengan rumah sakit, arena olahraga, pusat perbelanjaan, hingga tempat makan.

"Pembangunan akan dilakukan 1,5 tahun. Jadi, yang bekerja di bandara nanti tidak perlu bingung mencari tempat tinggal," ujarnya. Apalagi, jaraknya hanya 4 kilometer dengan BIJB Kertajati. Dia mengajak masyarakat dan pengusaha menangkap peluang tersebut.

Mengutip kajian Lembaga Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia, kehadiran BIJB Kertajati akan berdampak positif bagi perekonomian daerah dan nasional. Produk domestik regional bruto Jabar, misalnya, akan meningkat rata-rata 0,12 persen selama 2018-2047 dan untuk nasional meningkat 0,02 persen.

Gerbang masuk Jabar

Kawasan *aerocity* Kertajati juga akan menciptakan lapangan kerja bagi 15.401 orang pada 2020 hingga 26.364 orang pada 2024. "Untuk pembangunan kawasan bisnis, kami menerima segala strata pendidikan dan memprioritaskan masyarakat sekitar," lanjut Tjakra.

Kepala Kantor Perwakilan BI Cirebon Abdul Majid meyakini, kehadiran *aerocity* Kertajati harusnya dimanfaatkan pemerintah daerah di sekitar bandara. Salah satu yang dapat dikembangkan ialah industri pariwisata. "BIJB Kertajati ini gerbang utama untuk masuk ke Jabar. Untuk itu, pemerintah daerah di sekitar bandara harus bersinergi, misalnya, menyiapkan sumber daya manusianya," ujar Majid.

BI juga akan menggelar pertemuan dengan pemerintah Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan untuk membahas terkait kehadiran *aerocity*.

BIJB Kertajati akan melayani penerbangan umrah pada 14 Oktober dan haji tahun depan. "Penerbanganya menggunakan maskapai Lion Air. Rencananya, pesawat akan transit ke India sebelum ke Arab Saudi. Saat ini, sedang pemasaran," ujar Virda.

Sejak 8 Juni 2018, bandara seluas lebih dari 1.000 hektar itu mulai melayani penerbangan komersial. Saat ini, baru maskapai Citilink yang terbang dari Kertajati menuju Surabaya dan sebaliknya sekali sehari. Dalam waktu dekat, Lion Air membuka rute penerbangan Kertajati-Bali dan Kertajati-Kualanamu.

Menurut Virda, layanan penerbangan umrah dan haji sangat potensial di Jabar. Setiap tahun, sekitar 7,9 juta warga Jabar berangkat haji dan umrah. Penambahan panjang landas pacu dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter tengah dikerjakan dan akan selesai November 2018. (IKI)

Judul	**Citarum Masih Tercemar Sampah dan Limbah**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Rata-rata volume sampah mencapai 500.000 meter kubik pertahun		

LINGKUNGAN

Citarum Masih Tercemar Sampah dan Limbah

SOREANG, KOMPAS — Wajah buruk Sungai Citarum kembali terlihat pada musim kemarau ini. Di beberapa titik, sampah rumah tangga menumpuk menutupi permukaan sungai. Air yang mulai surut berwarna hitam dan menebarkan bau tak sedap.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (14/8/2018), sampah terlihat di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, hingga Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal itu, misalnya, tampak dari jembatan Cihampelas-Batujajar setinggi 20 meter dari permukaan sungai. Sebagian besar sampah berupa sampah rumah tangga. Air berwarna hitam pekat diduga dampak pembuangan limbah pabrik di sekitar sungai sepanjang 279 kilometer itu.

Aroma tidak sedap tercium di sekitar pintu masuk Waduk Saguling. Menggunakan air Citarum, Waduk Saguling adalah salah satu penghasil listrik tenaga air bagi jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali.

Camat Cihampelas Jajang Noor mengatakan, hal tersebut selalu terjadi tiap musim kemarau. Posisi Cihampelas yang berada di hilir aliran Citarum sebelum masuk Waduk Saguling menyebabkan sampah menumpuk di sana. "Sampah terbawa dari hulu. Kesadaran warga di Cihampelas sebenarnya sudah tumbuh. Mereka rutin mengambil sampah meski kapasitasnya terbatas. Namun, upaya ini tidak cukup karena warga di daerah hulu masih membuang sampah sembarangan," katanya.

> ***Rata-rata volume sampah di kawasan cekungan Bandung atau Citarum Hulu mencapai 500.000 meter kubik per tahun.***
>
> Suwarno

Mimi (58), warga Kutawaringin, Kabupaten Bandung, hampir tiap hari menemani suaminya, Ace (60), mencari rumput di bantaran Sungai Citarum. Jika sebelumnya banyak warga membuang sampah langsung ke sungai, kebiasaan itu jauh berkurang setahun terakhir.

Salah satu penghasil sampah diduga adalah warga Kota Bandung. Sampah dibawa beberapa anak Sungai Citarum yang melintas di Kota Bandung sebelum bertemu dengan sungai induk di kawasan Bojongsoang lantas mengalir ke Waduk Saguling.

Berdasarkan data Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung tahun 2016, sekitar 2,5 juta warga menghasilkan 1.500-1.600 ton sampah per hari. Namun, hanya 1.100-1.200 ton terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Sarimukti dan 150-250 ton diolah warga. Sisanya, 150-250 ton sampah, diduga dibuang ke anak Sungai Citarum.

Wakil Wali Kota Bandung Oded Muhammad Danial mengatakan, pola pengolahan sampah di Bandung semaksimal mungkin dilakukan langsung dari sumbernya, yaitu rumah tinggal. Jika masyarakat punya kemampuan memilah dan mengolah sampah, biaya untuk penanganan sampah bisa diminimalkan.

"Biaya penanganan sampah selama ini, metode angkut buang, sangat besar, Rp 150 miliar per tahun. Karena itu, penanganan pengolahan sampah mandiri bisa mengurangi biaya sehingga anggaran bisa dialokasikan ke aspek lain," kata Oded.

Normalisasi

Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Suwarno mengatakan, sampah masih menjadi masalah besar yang tengah dituntaskan. Bersama pengerukan sedimentasi, pengambilan sampah terus dilakukan. Namun, Suwarno mengatakan, hal itu belum maksimal. Sampah dan sedimentasi tak langsung dibawa ke TPA oleh pemerintah daerah. Akibatnya, sampah masuk ke sungai saat hujan dan mencemari sungai.

"Rata-rata volume sampah di kawasan cekungan Bandung atau Citarum Hulu mencapai 500.000 meter kubik per tahun. Namun, tidak semuanya terangkut ke TPA. Sisanya sekitar 40 persen," katanya.

Menurut Suwarno, sejak program Citarum Harum dicanangkan awal tahun, endapan sampah di Citarum jauh berkurang. Citarum Harum adalah program pemulihan kualitas lingkungan Citarum di bawah koordinasi pemerintah pusat. Suwarno menuturkan, pengerukan sampah dan sedimentasi dilakukan lebih intensif bersama personel Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi.

Wakil Komandan Satgas Citarum Harum Bidang Penataan Ekosistem yang juga Panglima Kodam III Siliwangi Mayor Jenderal Besar Harto Karyawan menuturkan, hingga saat ini pihaknya masih fokus pada pembersihan sampah permukaan Sungai Citarum.

"Hasilnya sudah terlihat. Sampah mulai berkurang. Sejauh ini, sampah paling banyak berasal dari rumah tangga," kata Harto.

(SEM/RTG)

Judul	**Kamboja Belajar dari Surabaya**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Kompas (Halaman, 18)		
Resume	Untuk bidang pengelolaan kota		

PENGELOLAAN KOTA

Kamboja Belajar dari Surabaya

SURABAYA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri Kamboja bersama pemimpin tujuh kota di Kamboja mengunjungi Kota Surabaya untuk belajar pengelolaan lingkungan. Rombongan wali kota dan wakil wali kota itu juga melihat langsung cara Pemerintah Kota Surabaya menata kota menjadi hijau dan pengaturan lalu lintas.

Rombongan 18 orang yang diinisiasi Global Green Growth Institute (GGGI) itu diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang sidang wali kota, Selasa (14/8/2018). Ada dalam rombongan, antara lain, Wakil Direktur DDC Kementerian Dalam Negeri Ing Chhe, Wali Kota Kampong Cham City Chan Phally, dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan Kamboja HEE Vuthy.

Pada pertemuan itu, Risma menjelaskan terutama pengelolaan lingkungan, tata kota, dan pengaturan lalu lintas. Penjelasan terkait pembangunan 420 taman di areal 133 hektar, pembuatan 403 lapangan olahraga, dan jalur hijau seluas 35 hektar.

"Pembangunan jalur hijau penting untuk menyerap karbon dioksida di jalanan supaya tidak masuk ke rumah penduduk. Kualitas udara dan suhu udara juga tetap bagus karena tanaman yang dipilih rata-rata bisa menyerap karbon dioksida," kata Risma.

Taman dan jalur hijau tidak sekadar ada, tetapi dirawat. Tanaman rutin diganti, dirotasi antartaman paling tidak setiap enam bulan. Pemkot Surabaya tak terlalu kesulitan bibit tanaman karena memiliki Kebun Bibit Wonorejo.

Untuk merawat taman dan jalur hijau itu, Pemkot Surabaya membuat 26 rumah kompos. Tidak hanya mengelola dan mengolah sampah, rumah kompos juga menjadi pembangkit listrik. Risma juga membeberkan program Surabaya Intelligent Transportation System, yaitu memantau lalu lintas melalui kamera pemantau, termasuk penerapan tilang di tempat dan layanan tanggap darurat lewat Command Center 112.

Lewat 112, warga bebas mengakses jika butuh pertolongan atau menginformasikan satu peristiwa untuk direspons Pemkot Surabaya. "Surabaya juga punya Suroboyo Bus yang penumpangnya bisa menikmati perjalanan dua jam hanya dengan membayar pakai botol plastik bekas," ujar Risma.

Udara bagus

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan Kamboja HEE Vuthy mengatakan, Surabaya merupakan kota ramah lingkungan dan sudah menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan. Jadi, masyarakat bisa hidup dengan mutu udara dan air lebih baik dibanding kota lain. "Beberapa pejabat kota di Kamboja yang ikut dalam rombongan ini perlu menimba ilmu mengelola kota di Surabaya," kata Vuthy.

Banyak hal dipelajari dari Surabaya, terutama penerapan kebijakan wali kotanya. "Kota yang sudah modern seperti ini, warganya masih bisa mengembangkan pertanian urban, ruang terbuka hijau begitu terawat, dan kota sangat rapi, warganya juga tertib," ucapnya.

Sejumlah program di Surabaya sudah diterapkan di beberapa kota di Kamboja. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal sosialisasi, terutama kesadaran membuang sampah pada tempatnya karena bisa didaur ulang seperti Surabaya.

Rombongan tertarik dengan sampah botol plastik sebagai alat bayar bus. "Kebijakan sangat inovatif. Saya tidak pernah mendengar seperti ini," ujar Vuthy. Seluruh informasi itu akan didiskusikan antarkota di Kamboja. (ETA)

Judul	**Infrastruktur Kunci Pacu Pertumbuhan**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Jalan, jembatan, rel kereta, pelabuhan, waduk, sarana irigasi ialah urat nadi perekonomian		

Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, dan sarana irigasi ialah urat nadi perekonomian.

Infrastruktur Kunci Pacu Pertumbuhan

Andhika Prasetyo
Andhika@mediaindonesia.com

LANSKAP DASAWARSA INFRASTRUKTUR: (Dari kiri) Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, Gubernur Lemhannas Agus Widjojo, moderator Fitra Faisal, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis Denni Puspa Purbasari, dan Corporate Secretary PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) Ramona Harimurti saat menyampaikan paparan dalam *Focus Group Discussion* bertema *Lanskap dasawarsa infrastruktur Indonesia* di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta, kemarin.

"KONDISI infrastruktur yang baik akan membuat kehidupan masyarakat lebih maju. Itu tidak perlu diperdebatkan lagi," ujar Sri Adiningsih, ekonom yang juga anggota anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dalam acara *Focus Group Discussion* bertema *Lanskap dasawarsa infrastruktur Indonesia* di Kantor Media Group, Jakarta, kemarin.

Ucapan pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada itu juga diamini para pembicara lain, seperti Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Ari Kuncoro serta Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika.

Ari bahkan mengibaratkan pembangunan infrastruktur sebagai aksi pasang kuda-kuda. Artinya, infrastruktur sebagai tumpuan untuk akhirnya menggerakkan pembangunan dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Menurut Ari, Indonesia memang memiliki industri yang cukup baik, terutama di hilir. Di sisi hulu pun tidak terlalu mengecewakan. Namun, kata dia, yang menjadi sorotan ialah ketika terjadi kekosongan di antara hulu dan hilir tersebut.

Permasalahan itu, menurut Ari, bisa diatasi dengan tiga langkah, yakni pengembangan infrastruktur, tenaga kerja, dan inovasi.

"Tetapi seperti yang saya katakan, jika ingin melakukan sesuatu, tentu harus kuda-kuda dulu. Itu dasarnya membangun infrastruktur," ujarnya.

Menurut Erani, pemerintah menyadari pembangunan infrastruktur mampu memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Meski berisiko tinggi dari sisi pembiayaan, langkah itu tetap harus ditempuh. "Intinya, nanti akan ada kemajuan yang benar-benar diraih karena keputusan tersebut. Sekarang juga sudah cukup dirasakan karena konektivitas sudah semakin baik, biaya logistik semakin dapat ditekan," ujarnya.

Seluruh generasi

Hal itu, sambung dia, juga secara tidak langsung akan menjadi standar bagi pemerintahan di periode selanjutnya untuk bekerja lebih baik lagi. "Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang diputuskan untuk dirasakan seluruh generasi, bukan untuk sesaat atau hari ini saja," ucapnya.

Infrastruktur berupa jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, waduk, dan sarana irigasi ialah urat nadi perekonomian. Hal itu pun disadari pemerintah. Oleh karena itu, beberapa saat seusai dilantik, Presiden Joko Widodo pun langsung tancap gas, membenahi daya saing lewat pembangunan infrastruktur yang menyeluruh. Tol Cipali yang tersendat penyelesaiannya, diinstruksikan diselesaikan dan dioperasikan sebelum Idul Fitri 2015. Tol itu bagian dari Tol Trans-Jawa. Selain itu, ujung selatan dan ujung utara Pulau Sumatra pun nantinya bakal terkoneksi oleh jalan kereta api dari Lampung ke Aceh. Begitu pun Trans-Sulawesi.

Dalam mencermati kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak, menurut Sri Adiningsih, pemerintah berupaya merampungkan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan proyek yang sudah berjalan.

"Makanya dalam konteks itu kita harus menekan belanja modal supaya tekanan pada rupiah tidak terlalu besar. Tidak dihentikan, tapi diperlambat. Jadi, ada prioritas lain yang harus kita kejar," kata ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi yang juga hadir dalam diskusi tersebut. (E-2)

Judul	**Jokowi akan Bangun Risha di Lombok**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, 20)		
Resume	Rumah korban gempa Lombok akan dibangun kembali dengan system rumah instan sederhana (Risha) tahan gempa		

Jokowi akan Bangun Risha di Lombok

Rumah korban gempa di NTB akan dibangun kembali dengan sistem rumah instan sederhana sehat (Risha) tahan gempa.

Yusuf Riaman
yusuf@mediaindonesia.com

PEMERINTAH akan membangun rumah instan sederhana sehat (risha) tahan gempa bagi korban gempa Lombok, NTB, yang rumahnya rusak. Anggaran untuk membantu rekonstruksi rumah warga yang rusak berat dibantu Rp50 juta dan rusak sedang Rp25 juta.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdialog dengan warga di salah satu Posko pengungsian korban gempa di belakang Kantor Kepolisian Sektor Pemenang, Kabupaten Lombok Utara,NTB, kemarin.

Pembangunan rumah, jelas Jokowi, akan dawasi Gubernur dan dibentuk bimbingan oleh Menteri PU. Sistem risha memiliki keunggulan bangunannya tahan terhadap gempa.

Risha sudah dibangun di Aceh sekitar 10ribu unitsetelah gempa yang diikuti tsunami melanda Aceh. Hingga kini, risha sudah terdapat di lebih dari 60 wilayah di Indonesia dengan jumlah mencapai ratusan ribu unit.

Sementara itu, Institut Teknologi Bandung menyerahkan empat unit alat penjernih air kepada Universitas Mataram. Alat ini bisa membantu pemenuhan air bersih bagi korban bencana gempa di sana.

Kekeringan

Wakil Komandan Satgas Siaga Darurat Karhutla, Riau, Edwar Sanger menyebutkan, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau telah mencapai 2.891,51 hektar. Kebakaran diperkirakan akan meluas mengingat cuaca panas yang menyelimuti wilayah hutan rawa gambut di Riau.

Data dari Posko Penanggulangan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran Kateng menyebutkan 1.541.396 hektare hutan dan lahan terbakar. Terbanyak di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.

Ditempat lain, 10 ribu hektare sawah terancam puso di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jateng. Di Pangandaran, Jabar, tercatat 16.426 hektare lahan pertanian kekeringan.

Sementara ratusan warga Kampung Leuweung Datar, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibodak, Kabupaten Sukabumi, Jabar, terpaksa mandi dua hari sekali. (YR/BR/AD/AS/DW/BY/RK/JI/SS/UL/J-3)

Judul	**Jabar Pacu Akses Penghubung Patimban**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah menggarap jalan dari Pamanukan hingga Patimban		

▸ PROYEK INFRASTRUKTUR

Jabar Pacu Akses Penghubung Patimban

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pembangunan akses penghubung menuju Pelabuhan Patimban, Subang bersamaan dengan pembangunan akses dari tol Cikopo—Palimanan atau Cipali.

redaksi@bisnis.com

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan, dari penandatanganan kesepakatan antara Dirjen Bina Marga dan Kedutaan Besar Jepang dan JICA, pembangunan jalan akses penghubung dari Pamanukan menuju Patimban tuntas pada akhir 2019.

"Kami harapkan pembangunan bersamaan. Saat ditandatangani ini tadi tidak dibahas," ungkapnya kepada *Bisnis*, Selasa (14/8).

Pembangunan jalan akses Patimban sendiri akan dikerjakan oleh pihak Simiju Corporation, PP Perumahan dan PT Cipta Bangun Kontraktor sepanjang 8,2 kilometer.

Berdasarkan kesepakatan, proyek fisik akan dibiayai dari pinjaman JICA yang mencapai Rp1,27 triliun. "Biaya itu sudah termasuk dengan paket supervisi untuk 18 bulan pengerjaan" ujarnya.

Menurutnya, pembangunan akses tol Cipali juga perlu didorong bersamaan karena berdasarkan target Pelabuhan Patimban sudah bisa beroperasi pada Februari 2020.

Iwa menjelaskan, PT Jasa Marga yang mendapat konsesi untuk membangun tol tersebut bisa mengerjakan ini secara paralel. "Supaya seiring dengan penyelesaian Patimban, kalau jalan akses untuk tolnya sudah siap," paparnya.

Menurut rencana, jalan akses ini akan tersambung dengan akses tol Cipali sepanjang 37 kilometer sehingga total panjang tol nantinya menjadi 45,2 kilometer. Untuk akses tersebut, dia memastikan, tinggal dilakukan konstruksi dan pengawasan mengingat pembebasan lahan sudah tuntas. "Rencana akhir 2019, tapi kita dorong supaya lebih cepat lagi," tuturnya.

Proyek jalan penghubung dengan panjang 8,2 kilometer, menurutnya, akan dibangun jalan sepanjang 5,9 kilometer, jalan layang 1,6 kilometer, dan timbunan 0,96 kilometer. Jalan tersebut akan dibangun dua arah dengan kapasitas empat lajur. "Jalan ini tersambung dengan ruas nasional Pantai Utara Jawa," katanya.

Iwa memastikan bahwa Pemprov Jabar akan berperan maksimal guna memuluskan pembangunan fasilitas pendukung tersebut, seperti urusan penetapan lokasi dan penyelesaian persoalan yang muncul di lapangan."Soal koordinasi, agar Patimban bisa lebih cepat selesai dari target," ujarnya.

Penjabat Gubernur Jabar M.Iriawan menambahkan, pihaknya sudah mendapat kabar jika *groundbreaking* Patimban akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Agustus ini. Menurutnya, rencana pelabuhan ini sudah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat setempat terutama urusan pembebasan lahan.

"Saya minta yang disana membantu karena harga yang digunakan [*appraisal*] sudah sesuai aturan yang berlaku. Sayang, kalau *nggak*, lama-lama Jepang bisa pindah ke tempat lain, ke Jawa Tengah misalnya," ujarnya.

Berdasarkan data rencana Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Subang, ditetapkan dengan kebutuhan lahan sekitar 372 hektare. Adapun lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimban, meliputi Kecamatan Pusakanagara Daerah Kabupaten Subang, terdiri atas Desa Patimban, Desa Kalentambo, Desa Gempol, Desa Pusakaratu dan Desa Kotasari serta Desa Pusakajaya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi membangun kawasan pusat pertumbuhan ekonomi ini.

"Kita bersama-sama mengembangkan atau menggunakan, misal Patimban sebagai suatu daerah logistik. Industri di Jawa Barat kita kembangkan supaya ini bisa memberikan dukungan bagi Patimban dan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat," paparnya.

▸ Pemprov Jabar akan berperan maksimal guna memuluskan pembangunan fasilitas pendukung tersebut.

KERETA LAYANG

Pada perkembangan lain, Kementerian Perhubungan menyatakan pembangunan *elevated railway* atau jalur kereta layang di Medan, Sumatra Utara telah mencapai 94% dan diperkirakan rampung pada akhir Desember 2018.

Pejabat Pembuat Komitmen Medan 1 Balai Teknik (Baltek) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Fahrul Rifai Hasibuan didampingi Manager Humas PT KAI Divre I Sumut M. Ilud Siregar menyatakan jalur kereta ganda tahap pertama tersebut diharapkan dapat dioperasikan mulai awal 2019 untuk mengurangi kepadatan jalur kereta api di Medan.

"Progress konstruksinya sekarang kurang lebih sudah 94%. Nilai proyeknya mulai 2015—2018 mencapai Rp2,86 triliun," katanya, di kantor PT KAI Divre I Sumut, Medan, Selasa (14/8).

Dia menjelaskan, proses kontruksi yang dilakukan mencakup pemasangan bentang tengah atau span dan rel kereta yang berjalan secara paralel. Setelah konstruksi rampung, kemudian diikuti dengan tahap pemeriksaaan dan pengujian.

"Kurang lebih ada 62 bentang yang belum terpasang dari total 213. Proses pemasangan rel juga sekarang sedang berjalan. Diharapkan akhir tahun pada Desember nanti bisa selesai semua kegiatan dan operasionalnya kemungkinan paling lambat pada Januari," ujarnya.

Fahrul mengungkapkan pembangunan *elevated railway* yang dilakukan dalam tiga tahun ini adalah tahap pertama yang mencakup dua jalur dari total enam jalur yang direncanakan. (KSI/Iropesta sitorus)

Judul	**Tak Capai 50% Target, Kuota Dialihkan**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Pemerintah akan mengevaluasi kinerja perumahan		

BANK PENYALUR FLPP

Tak Capai 50% Target, Kuota Dialihkan

JAKARTA — Pemerintah akan mengevaluasi kinerja perbankan dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada akhir kuartal III/2018 ini, guna menentukan kuota berikutnya.

Pemerintah mengevaluasi kinerja perbankan dalam penyaluran FLPP pada September. Bila bank tak mampu salurkan 50% kuota, kuotanya akan dialihkan ke bank yang memiliki potensi lebih besar.

Ipak Ayu H.N. & Anitana W. Puspa
redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti mengatakan penyesuaian dilakukan jika bank penyalur tidak mampu menyalurkan 50% dari kuota yang sudah diwajibkan hingga September atau Kuartal III/2018 nanti.

Hal tersebut memastikan pemerintah segera mengalihkan penyaluran kuota pada bank yang memiliki potensi lebih besar. "September kami evaluasi. Kalau ada yang sampai tidak 50% dari kuota akan dialihkan ke bank lain yang berpotensi menyalurkan," katanya, Selasa (14/8).

Sementara itu, dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 463/2018 tentang Proporsi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maka mulai tanggal 1 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 berubah menjadi 75:25 efektif diberlakukan.

Dengan menurunnya porsi pemerintah maka jumlah rumah yang ditargetkan juga meningkat dari 43.000 unit menjadi 50.625 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

BACKLOG 5,4 JUTA

Basuki mengemukakan tahun ini pemerintah juga resmi menggandeng 43 bank pelaksana untuk menyalurkan FLPP senilai Rp9,5 triliun. Dia optimistis kekurangan angka *backlog* perumahan berkurang menjadi 5,4 juta unit pada 2019.

Saat ini, data *backlog* telah berkurang dari 11,4 juta menjadi 7,6 juta unit pada 2015. Dengan demikian target 5,4 juta pada 2019 tentunya bisa dicapai. "Kalau *backlog* per tahun yang masih harus dicapai ya kita bisa hitung sendiri dari 7,6 juta ke 5,4 juta berapa lalu dibagi 5."

Basuki menyebut untuk mengatasi defisit tersebut, maka FLPP, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) memanfaatkan berbagai data strategis perumahan, salah satunya adalah data *home ownership rate* /persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri pada 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono mengatakan jumlah bank penyalur ini meningkat dari tahun lalu yang sebanyak 40 bank yang terdiri dari 6 bank nasional dan 34 bank daerah.

"Tahun lalu ada Bank Mayapada yang sekarang mundur sebagai bank penyalur, tetapi ada empat bank yang kemarin tidak menyalurkan ikut bergabung yakni Bank BTN, BTN Syariah, KEB Hana, dan BRI Agroniaga. Jadi jumlahnya 43 sekarang."

Melalui sinergi penyaluran KPR FLPP antara PPDPP, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Pelaksana Penyaluran KPR, SMF berkomitmen untuk menyediakan dana jangka menengah panjang sebesar 25% kepada Bank Pelaksana.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiogo mengatakan bahwa melalui program pembiayaan KPR dengan suku bunga tetap yang difasilitasi SMF, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi *mismatch funding* pada penyaluran KPR FLPP.

Sementara itu, Direktur Bank BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan keputusan pemerintah untuk mempercayakan penyaluran FLPP tidak hanya kepada Bank BTN, tapi juga BTN Syariah.

Oleh karena itu, Bank yang sudah menyalurkan KPR BTN selama lebih dari 41 tahun ini untuk tahap awal diberikan alokasi penyaluran KPR Sejahtera atau FLPP untuk 9.500 unit, dengan 464 unit di antaranya akan dilaksanakan BTN Syariah lewat akad Murabahah (jual beli). Hal itu juga akan mempercepat target penyaluran subsidi yang dipatok perusahaan sebanyak 600.000 unit.

"Bank BTN siap menerima limpahan dari Bank pelaksana lain yang belum optimal menyalurkan FLPP untuk membantu PPDPP mencapai target,"katanya.

Imam melihat peluangnya masih besar, karena permintaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap tumbuh dan terdorong oleh kebijakan Bank Indonesia yang telah resmi memberlakukan relaksasi rasio kredit terhadap nilai agunan atau *Loan To Value* properti per 1 Agustus lalu.

Bank Penyalur Kredit Bersubsidi Rumah Bertambah

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan addendum Perjanjian Kerjasama Operasional dengan bank Pelaksana, yang kini bertambah dengan bergabungnya Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank KEB Hana dan Bank BRI Agroniaga. Total bank pelaksana yang menyalurkan dana FLPP pada tahun 2018 menjadi 43 bank, terdiri dari 11 Bank Umum Nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pelaksana Penyalur Dana FLPP

- Bank Arta Graha Internasional
- Bank Rakyat Indonesia
- Bank Negara Indonesia
- Bank Mandiri
- Bank Tabungan Pensiunan Nasional
- Bank Sumut
- Bank Riau Kepri
- Bank Nagari
- Bank Jambi
- Bank Sumselbabel
- Bank BJB
- Bank DKI
- Bank Jateng
- Bank BPD DIY
- Bank Jatim
- Bank NTB
- Bank NTT
- Bank Bali
- Bank Kaltimtara
- Bank Kalbar
- Bank Kalsel
- Bank Kalteng
- Bank SulutGo
- Bank Sulteng
- Bank Sultra
- Bank Sulselbar
- Bank Papua
- Bank BRI Syariah
- Bank Syariah Mandiri
- Bank Aceh
- Bank Sumut Syariah
- Bank Jambi Syariah
- Bank Sumselbabel Syariah
- Bank BJB Syariah
- Bank Jateng Syariah
- Bank Jatim Syariah
- Bank Kaltimtara Syariah
- Bank Kalsel Syariah
- Bank Sulselbar Syariah
- Bank BTN
- Bank BTN Syariah
- Bank KEB Hana
- Bank BRI Agroniaga

Sumber: PPDPP

BISNIS/TUTUN PURNAMA

Judul	**60% Paket Kontraktual Diprioritaskan**	Tanggal	Rabu, 15 Agustus 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 27)		
Resume	Untuk lelang dini di Kementerian PUPR		

▶ LELANG DINI KEMENTERIAN PUPR

60% Paket Kontraktual Diprioritaskan

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali bersiap melakukan lelang dini dengan target sebanyak 60% paket dari total paket kontraktual harus sudah terkontrak pada Januari 2019.

Sebagai informasi, Dalam RAPBN 2019, Kementerian PUPR mendapatkan pagu Rp110,7 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak 83,5% atau Rp91,85 triliun merupakan paket kontraktual berupa belanja modal dan barang berkarakter modal.

Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Direktorat Bina Konstruksi Kementerian PUPR pada 9 Agustus 2018, sebanyak 60% dari total paket kontraktual sudah harus masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Oktober 2018.

"Penyiapan dokumen pengadaan mulai dilakukan pada September, dan Oktober mulai proses lelang dini kelompok I sebanyak 60%," kata Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanudin, dalam surat edarannya, Selasa (14/8).

Syarif mengatakan pada periode Agustus-September, paket kontraktual harus ditetapkan untuk dilaksanakan serta menyiapkan *readiness criteria*, dokumen teknis dan dokumen lelang dini untuk kelompok 1 sekitar 60% dari total proyek kontraktual.

Setelahnya, Kementerian PUPR juga akan memulai pelelangan kelompok II sebesar 20% dari total proyek kontraktual pada November 2018. Dengan demikian, sebesar 80% proyek kontraktual di Kementerian PUPR TA 2019 akan dikebut pelelanganya untuk dilakukan di tahun ini.

"Bulan Desember DIPA 2019 disahkan dan mulai tanda tangan kontrak untuk paket kelompok I pada bulan Januari. Kontrak dapat ditandatangani lebih awal jika DIPA telah disahkan," katanya.

Adapun, 20% paket kontraktual sisanya berupa paket *multiyears*, dan dukungan pemda/pihak lain ditargetkan dapat dimulai pada awal Januari.

LEBIH SEDIKIT

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini seluruh direktorat masih mengindentifikasi jumlah total paket kontraktual yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2019.

Endra memperkirakan jumlah total paket tersebut akan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah paket yang dilelangkan tahun ini di kisaran 10.000 paket. Pasalnya, dia mengatakan tidak akan ada lagi lelang proyek *multiyears* baru pada 2019 kecuali untuk proyek bendungan dan irigasi.

"Tahun depan itu akan lebih ke proyek *single years* saja, namun ini masih diidentifikasi. Biasanya proyek *multiyears* ini kan yang lelangnya agak lama," ujarnya.

Adapun, dia mengatakan pihaknya belum bisa memperkirakan jumlah nilai paket kontraktual yang 60% ditargetkan sudah mulai lelang per Oktober.

"Bisa jadi yang 60% itu proyek yang kecil, sementara proyek bendungan yang besar di akhir. Kalau *multiyears* memang agak lama karena salah satunya membutuhkan izin Kemenkeu, butuh proses."

Adapun, per minggu pertama Agustus, progres pelelangan paket kontraktual untuk tahun anggaran 2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tinggal menyisakan 932 paket pekerjaan atau setara dengan nilai Rp9,3 triliun.

Endra mengatakan dari jumlah yang belum menyelesaikan lelang, sebanyak 467 paket merupakan kontrak multiyears sebesar Rp7,1 triliun dan 455 paket sisanya merupakan kontrak tahun tunggal dengan nilai Rp2,2 triliun.

"Dari jumlah itu yang belum lelang sama sekali sedikit, lebih banyak yang tengah dalam proses lelang," ujarnya.

Adapun, jumlah total paket kontraktual Kementerian PUPR hingga 7 Agustus 2018 mencapai 10.122 paket atau setara dengan Rp87,6 triliun. *(Irene Agustine)*